

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 362-368
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15628106>

Pengaruh Kebijakan Ekonomi Publik Terhadap Iklim Investasi di Negara Berkembang

Sherli Inggriani Harahap, Siti Mutmainnah, Reni Anggraeni, Melda, Chairunissa Putri Anjani, Alfikritullah, Zakhira Ramdana Putra, Dian Herdiana

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sherliinggriani1001@gmail.com, mutisiti981@gmail.com, areni2616@gmail.com,
meldamel@gmail.com, chairunisaptrnj@gmail.com, fikritullah@gmail.com, zakhiraramdana@gmail.com,
dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kebijakan ekonomi publik memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi publik memengaruhi daya tarik investasi, baik domestik maupun asing. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data sekunder, artikel ini menelaah berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari subsidi, insentif fiskal, pembangunan infrastruktur, hingga reformasi regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi, kejelasan hukum, dan efisiensi birokrasi menjadi faktor kunci dalam menarik investor. Di sisi lain, inkonsistensi regulasi dan ketidakpastian ekonomi terbukti menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ekonomi publik yang terukur dan berkelanjutan menjadi syarat mutlak dalam memperbaiki iklim investasi di negara berkembang.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Publik, Iklim Investasi, Negara Berkembang

Abstract

Public economic policies play an important role in creating a conducive investment climate in developing countries. This study aims to analyze how fiscal, monetary, and public regulatory policies affect the attractiveness of investment, both domestic and foreign. Using a descriptive qualitative approach through literature studies and secondary data, this article examines various government policies, ranging from subsidies, fiscal incentives, infrastructure development, to regulatory reform. The results of the study indicate that macroeconomic stability, legal clarity, and bureaucratic efficiency are key factors in attracting investors. On the other hand, regulatory inconsistency and economic uncertainty have proven to be major obstacles. Therefore, the formulation of measurable and sustainable public economic policies is an absolute requirement in improving the investment climate in developing countries.

Keywords: Public Economic Policy, Investment Climate, Developing Countries

Article Info

Received date: 20 May 2025

Revised date: 25 May 2025

Accepted date: 06 June 2025

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Salah satu faktor utama yang menentukan daya tarik suatu negara bagi investor, baik domestik maupun asing, adalah kebijakan ekonomi publik yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal, moneter, regulasi pajak, perlindungan hukum, hingga transparansi birokrasi memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi investor terhadap risiko dan potensi keuntungan. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan, inefisiensi lembaga publik, serta ketidakstabilan politik sering kali menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kebijakan ekonomi publik dan iklim investasi menjadi penting, terutama bagi negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi publik memengaruhi iklim investasi di negara berkembang serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki daya saing investasi melalui pendekatan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dinamika global yang terus berkembang, seperti perubahan kebijakan ekonomi negara maju, fluktuasi harga komoditas, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi turut

memengaruhi keputusan investasi di negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu memiliki kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi. Ketidakmampuan pemerintah dalam merespon tantangan global tersebut dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan investor dan aliran modal yang tidak stabil.

Kebijakan ekonomi publik yang efektif juga tidak hanya bergantung pada substansi kebijakannya, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Partisipasi publik, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, serta akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah menjadi faktor pendukung penting yang dapat menciptakan iklim investasi yang sehat. Oleh karena itu, kajian terhadap keterkaitan antara kualitas kebijakan publik dan iklim investasi sangat relevan untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan di negara berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antara kebijakan ekonomi publik dan iklim investasi di negara berkembang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks dan dinamis dalam konteks kebijakan publik dan investasi.

HASIL

Bentuk Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia sebagai Negara Berkembang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan ekonomi publik. Kebijakan ini menjadi instrumen penting negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk kebijakan yang paling menonjol adalah pemberian subsidi dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah sebelumnya memberikan subsidi secara umum, seperti untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Namun, karena banyak subsidi dinikmati juga oleh kelompok mampu, kebijakan ini kemudian diubah menjadi bantuan yang lebih terarah. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako merupakan contoh bantuan sosial yang ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin agar daya beli mereka tetap terjaga.

Selain itu, pembangunan infrastruktur berskala nasional juga menjadi bentuk kebijakan publik yang strategis. Pemerintah secara aktif membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menurunkan biaya logistik. Langkah ini penting untuk membuka peluang ekonomi di daerah tertinggal dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam aspek perpajakan, pemerintah telah melakukan reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, terutama sektor UMKM, agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Kebijakan moneter dan fiskal yang stabil juga menjadi bagian dari kebijakan ekonomi publik. Bank Indonesia menjalankan kebijakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara itu, pemerintah pusat mengelola anggaran negara untuk memberikan stimulus ekonomi, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan selama masa pandemi COVID-19. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus dalam kebijakan publik karena sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memberikan berbagai dukungan seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, serta akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan mikro. Dukungan ini diharapkan dapat membantu UMKM berkembang dan meningkatkan produktivitas.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi publik di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika ekonomi global.

Sejauh mana kebijakan ekonomi publik memengaruhi iklim investasi di negara berkembang

Kebijakan ekonomi publik memiliki peran strategis dalam membentuk suasana investasi di negara berkembang. Di tengah arus globalisasi yang semakin mengikat ekonomi antarnegara, pemerintah di negara-negara berkembang dituntut untuk mampu menarik investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan, sembari tetap menjaga tata kelola yang baik, kestabilan ekonomi, dan kepercayaan pelaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi publik menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan dengan fondasi institusional yang kuat.

Aspek paling mendasar dalam kaitannya dengan iklim investasi adalah kestabilan makroekonomi. Faktor-faktor seperti inflasi yang terjaga, stabilitas nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang disiplin menjadi acuan penting bagi investor, baik lokal maupun asing. Pemerintah yang mampu menjaga indikator-indikator ini dengan kebijakan moneter dan fiskal yang harmonis akan menciptakan rasa aman bagi investor. Sebaliknya, ketidakpastian fluktuasi ekonomi, defisit anggaran yang tidak terkendali, atau depresiasi tajam nilai tukar dapat menghambat minat investor. Laporan *Global Economic Prospects* dari Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi yang tinggi menjadi faktor utama yang menghambat masuknya investasi asing langsung (FDI) ke negara berkembang.

Selain kestabilan ekonomi, efektivitas institusi dan kepastian regulasi turut menjadi aspek penting yang memengaruhi persepsi investor. Regulasi yang tidak konsisten, tidak transparan, atau sulit ditegakkan cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko berusaha. Laporan *World Investment Report* oleh UNCTAD (2023) mengungkap bahwa negara-negara yang mampu menghadirkan sistem hukum yang kredibel, proses perizinan yang efisien, serta lembaga yang profesional, cenderung lebih sukses dalam menarik dan mempertahankan investor. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi yang mendukung iklim investasi.

Pemerintah negara berkembang juga sering mengandalkan pemberian insentif ekonomi untuk menarik investor. Kebijakan seperti pembebasan pajak, keringanan bea masuk, atau penyediaan fasilitas industri sering kali digunakan. Namun demikian, efektivitas insentif sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan secara menyeluruh. OECD melalui *Investment Policy Reviews: Indonesia* (2021) menekankan bahwa stabilitas regulasi dan efisiensi administratif sering kali lebih dihargai oleh investor dibandingkan sekadar insentif fiskal yang bersifat sementara. Ketika regulasi berubah di tengah jalan atau prosedur birokrasi menyulitkan, insentif tersebut menjadi kurang efektif.

Infrastruktur ekonomi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Jalan yang layak, pelabuhan modern, jaringan listrik yang stabil, dan akses internet yang memadai dapat memangkas biaya logistik serta meningkatkan efisiensi produksi. Ketika infrastruktur tidak memadai, biaya usaha meningkat dan daya saing negara menjadi menurun. Dalam laporan *Infrastructure for a Seamless Asia* (ADB, 2019), kekurangan investasi pada infrastruktur disebut sebagai hambatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, terutama di kawasan Asia.

Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia turut menentukan apakah suatu negara dapat menarik investasi yang berkualitas. Negara dengan tenaga kerja yang terlatih, adaptif, dan produktif memiliki daya saing tinggi di mata investor, khususnya di sektor industri padat karya dan teknologi. Oleh karena itu, investasi publik di bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta penguatan keterampilan menjadi hal yang sangat krusial. Keterpaduan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan industri menjadi kunci dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar global.

Pembukaan akses terhadap pasar internasional dan keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan juga memberikan nilai tambah bagi daya tarik investasi. Negara-negara yang aktif membuka diri melalui liberalisasi tarif dan perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN atau AfCFTA, menawarkan akses pasar yang lebih luas kepada investor. *World Trade Report* dari WTO (2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam blok-blok perdagangan memiliki dampak positif terhadap peningkatan FDI, terutama dalam sektor ekspor dan manufaktur.

Akhirnya, persepsi terhadap kredibilitas pemerintah serta konsistensi arah kebijakan ekonomi juga turut membentuk kepercayaan investor. Ketika pemerintah menunjukkan

komitmen terhadap reformasi struktural, transparansi, dan pemberantasan korupsi, maka sinyal positif tersebut dapat menutupi kelemahan struktural lainnya. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan yang jelas, stabil, dan responsif terhadap dinamika global menjadi bagian dari strategi membangun iklim investasi yang sehat.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi publik memengaruhi investasi melalui banyak jalur: mulai dari kestabilan ekonomi makro, kualitas tata kelola, insentif fiskal, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, hingga keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Negara berkembang yang mampu merancang kebijakan yang terintegrasi, konsisten, dan ramah terhadap investasi akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik modal jangka panjang, yang pada gilirannya akan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor Kebijakan Ekonomi Publik yang Berpengaruh terhadap Iklim Investasi

Iklim investasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu faktor utama yang memengaruhi iklim investasi adalah kepastian hukum dan regulasi. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi peraturan dan penegakan hukum yang adil menjadi prasyarat bagi tumbuhnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Ketika regulasi bersifat inkonsisten atau berubah-ubah tanpa kepastian, investor cenderung menunda atau bahkan membatalkan niat untuk menanamkan modalnya.

Faktor berikutnya adalah stabilitas ekonomi makro. Indikator seperti inflasi, nilai tukar, dan defisit anggaran sangat menentukan persepsi investor terhadap risiko yang mungkin timbul. Stabilitas makroekonomi memberi keyakinan bahwa investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa gangguan dari volatilitas pasar. Dalam pengalaman Indonesia, stabilitas ekonomi seringkali menjadi pertimbangan utama bagi investor asing dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan fiskal dan perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Struktur pajak yang tidak memberatkan, serta adanya insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance, berperan dalam mendorong investasi ke sektor-sektor prioritas. Namun, implementasi insentif harus dilakukan dengan selektif dan transparan agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau celah penghindaran pajak.

Infrastruktur ekonomi juga menjadi variabel penentu yang tak kalah penting. Jalan, pelabuhan, energi, dan jaringan teknologi informasi yang memadai akan mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi produk. Dalam konteks Indonesia, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi langkah strategis agar investasi tidak terpusat di kawasan tertentu saja. Kemudahan berusaha (ease of doing business) merupakan refleksi dari efisiensi birokrasi publik. Reformasi perizinan dan simplifikasi prosedur administratif memperkecil hambatan administratif dan biaya transaksi. Negara-negara yang konsisten melakukan penyederhanaan perizinan terbukti lebih kompetitif dalam menarik investasi global.

Dukungan terhadap perdagangan internasional, melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, menjadi dorongan tambahan bagi investor yang berorientasi ekspor. Dengan terbukanya akses pasar internasional, investor memperoleh insentif secara tidak langsung berupa peluang perluasan pasar. Hal ini menjadi relevan dalam konteks integrasi ekonomi kawasan seperti ASEAN. Stabilitas politik dan keamanan nasional adalah faktor non-ekonomi yang berdampak langsung pada keputusan investasi. Ketidakpastian politik, konflik sosial, maupun korupsi berkontribusi terhadap meningkatnya risiko investasi. Oleh karena itu, konsistensi arah kebijakan serta tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi faktor penunjang iklim investasi.

Sumber daya manusia (SDM) yang unggul turut memengaruhi produktivitas sektor usaha. Ketersediaan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang teknologi dan manufaktur, menjadi daya tarik bagi investasi padat modal. Oleh karena itu, investasi negara dalam pendidikan dan pelatihan kerja menjadi kunci dalam mendukung sektor produktif. Sistem keuangan yang efisien serta inklusi keuangan yang tinggi mendukung pembiayaan usaha secara luas. Ketika pelaku usaha kecil hingga besar memiliki akses terhadap layanan perbankan dan pasar modal, maka pertumbuhan investasi akan lebih merata dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menjamin stabilitas sistem keuangan agar mendukung ekosistem investasi.

Akhirnya, pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat menjadi daya tarik tersendiri. Keberadaan arbitrase independen dan pengadilan niaga yang profesional memperkuat kepastian hukum. Investor cenderung merasa aman bila terdapat sistem legal yang mampu

menyelesaikan konflik dengan cepat dan adil.

Dampak Jangka pendek dan Jangka Panjang dari Kebijakan Ekonomi Publik Terhadap Kepercayaan Investor

Kebijakan ekonomi publik dalam jangka pendek dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada fluktuasi kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. M. Chatib Basri (2012) menyatakan bahwa respons investor sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat reaktif, khususnya dalam konteks krisis global atau perlambatan ekonomi. Misalnya, ketika pemerintah tiba-tiba menaikkan tarif pajak, memberlakukan pembatasan impor, atau menerapkan pembatasan devisa, investor cenderung mengambil sikap hati-hati dan menunda keputusan investasi. Dalam kasus Indonesia, pengalaman selama krisis 1998 dan krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa inkonsistensi atau ketidaktegasan kebijakan jangka pendek menyebabkan capital outflow, depresiasi nilai tukar, serta penurunan tajam di pasar saham. Hal ini mencerminkan bagaimana persepsi risiko dapat meningkat tajam hanya karena sinyal kebijakan yang ambigu atau tidak konsisten. Oleh karena itu, penentuan kebijakan jangka pendek perlu disertai dengan komunikasi publik yang jelas dan terukur untuk menjaga keyakinan pasar.

Namun, jika kebijakan jangka pendek diarahkan untuk mengelola stabilitas makroekonomi dengan hati-hati, dampaknya bisa positif terhadap persepsi risiko dan kepercayaan investor. Menurut Sri Mulyani Indrawati (2006), transparansi anggaran dan disiplin fiskal dalam merespons tekanan ekonomi membantu menciptakan kepastian pasar yang sangat dihargai oleh investor. Kebijakan stimulus yang terukur dan pengendalian inflasi yang konsisten menunjukkan bahwa pemerintah memahami dinamika fiskal dan memiliki kapasitas institusional untuk menanganinya. Hal ini dibuktikan pada saat pandemi COVID-19, ketika penyesuaian APBN, refocusing anggaran, dan keberanian pemerintah dalam menerbitkan surat utang secara strategis mendapat respons positif dari pasar internasional, bahkan di tengah tekanan global. Rating kredit Indonesia tetap stabil karena investor menilai adanya komitmen kuat terhadap disiplin fiskal dan reformasi struktural jangka menengah, karena itu, kebijakan jangka pendek yang terukur dan transparan bukan hanya menenangkan pasar, tetapi juga memperkuat reputasi fiskal pemerintah di mata investor global.

Dalam jangka panjang, kredibilitas dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan investor secara berkelanjutan. Boediono (2002) menekankan pentingnya good governance dalam pengelolaan ekonomi makro, termasuk penguatan institusi fiskal dan moneter yang mampu merancang dan menjalankan kebijakan secara independen serta bebas dari intervensi politik jangka pendek. Investor asing jangka panjang seperti penanam modal langsung (FDI) tidak hanya menilai kebijakan fiskal tahunan, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan hak kepemilikan dalam jangka waktu yang lama. Dalam iklim kebijakan yang penuh ketidakpastian, mereka akan cenderung memilih negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mendukung kepastian berusaha. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi kebijakan yang pro-pasar, termasuk dalam bidang perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan, sangat penting untuk menjaga daya tarik investasi dalam jangka panjang.

Selain itu, Mohammad Sadli (2002) menyoroti bahwa reformasi struktural seperti penyederhanaan birokrasi, pemberantasan korupsi, serta kebijakan industri yang efisien dan pro-pasar merupakan faktor kunci tumbuhnya kepercayaan investor. Menurutnya, tanpa perbaikan institusional, kebijakan ekonomi hanya akan bersifat reaktif dan tidak mampu menciptakan efek jangka panjang yang stabil. Reformasi yang konsisten akan menciptakan ekosistem yang mendukung kelangsungan usaha dan meminimalkan risiko regulasi. Negara yang secara konsisten memperbaiki tata kelola dan memperluas ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan ekonomi akan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari investor, karena dianggap memiliki risiko sistemik yang lebih rendah. Sadli juga menekankan bahwa stabilitas politik dan kebijakan yang tidak mudah berubah akibat tekanan jangka pendek dari aktor-aktor politik merupakan salah satu keunggulan strategis dalam kompetisi menarik investasi global. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura menjadi contoh konkret bagaimana komitmen kebijakan jangka panjang berdampak langsung terhadap arus investasi.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi publik yang terencana, akuntabel, dan konsisten memiliki dampak besar terhadap kepercayaan investor, baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Dalam konteks Indonesia, pemikiran para ekonom seperti Basri, Boediono, dan Sadli menunjukkan bahwa integritas kebijakan dan stabilitas institusional menjadi kunci dalam menarik dan mempertahankan investasi. Kepercayaan investor tidak dibangun dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari serangkaian keputusan kebijakan yang kredibel, konsisten, dan berpihak pada efisiensi serta keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan jangka pendek yang bersifat pragmatis dan responsif, tetapi juga pada visi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas institusi, tata kelola yang bersih, serta komunikasi kebijakan yang efektif merupakan investasi non- fisik yang nilainya tak kalah penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang dari komunitas investor global.

SIMPULAN

Kebijakan ekonomi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim investasi di negara berkembang. Kebijakan yang dirancang secara strategis, seperti pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, dan jaminan stabilitas makroekonomi, terbukti mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong arus modal masuk. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kredibilitas institusi negara. Negara berkembang perlu memastikan bahwa regulasi berjalan transparan, proses birokrasi tidak berbelit, serta terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hanya dengan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan, iklim investasi yang sehat dan kompetitif dapat tercipta, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Bank, asian Development, *Infrastructure For a Seamless Asia*, 2019
- Basri, M. Chatib, 'Indonesia's Economic Studies', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48 (2012), 183–203
- Blank, World, *Global Economic Prospects: Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis*, 2020
- Boediono, *Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Harapan Reformasi* (Universitas Gadjah Mada, 2022)
- Development, Organisation for Economic Co-operation and, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*, 2021
- Development, United Nations Conference on Trade and, *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*, 2023 <<https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>>
- Dimiyati, Hilda Hilmiah, 'Alternatif Untuk Mekanisme Arbitrase Dalam Perlindungan Investor', 02 (2014), 342–55
- Indrawati, Sri Mulyani, *Fiscal Policy for Crisis Response and Recovery*, 2006
- Kartikasari, Dewi, 'Inklusi Keuangan Dan Daya Tarik Investasi', 20 (2016), 120–31 <Universitas Kristen Petra>
- Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta, 2023)
- Laporan Tahunan 2022:UMKM Naik Kelas* (Jakarta, 2022)
- Organization, World Trade, *World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade*, 2022
- Pajak, Direktorat Jendral, *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakam: Penjelasan Dan Implementasi* (Jakarta, 2022)
- Purwanto, *Hukum Dan Iklim Investasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Raisa Muhamad Rasyidin, Raja Sakti Putra Harahap, 'No Titl', *Jurnal Vishe*, 01, 1–15

Kementrian Keuangan, *Nota Keuangan Dan RAPBN 2023* (Jakarta, 2022) *RPJMN* (Jakarta, 2021)

Sadli, Mohamad, 'Reformasi Ekonomi Di Indonesia: Kemajuan Dan Hambatan', *Indonesian, Quarterly*, 30 (2002), 217–26

Suharto, Edi, *Ketenagakerjaan Dan Investasi: Pendekatan Human Capital* (Bandung: Reflika Aditama, 2019)